



Dinamika Konflik Politik Ruang Digital

(Strategi Resolusi Dan Penguatan Demokrasi)

Ilham Ubaidillah¹, Hikmah Auliya², Siti Wardatunnisa³, Najlaa Ayu Febrianti⁴,
Ratna Sari Dewi⁵

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹⁻⁵

Email Korespondensi: ilhamubaidillah467@gmail.com, hikmahaulia31@gmail.com,
sitiwardatunnisa32@gmail.com, Najlaaayu@gmail.com, ratnasaridewi@untirta.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

The development of information technology has transformed political communication in Indonesia, positioning social media as a primary arena for interaction, mass mobilization, and political conflict. The high level of public engagement on digital platforms has contributed to increasing polarization, the spread of unverified information, and emotionally driven debates that may undermine the quality of democracy. This study aims to examine the dynamics of political conflict in the digital sphere, identify patterns of mobilization that may escalate tensions, and formulate conflict resolution strategies that support the strengthening of deliberative democracy. This research employs a qualitative approach through a literature review using thematic analysis of various relevant scholarly sources. The findings indicate that political conflict in the digital realm is structured, communicative, and deliberative in interconnected ways. Rapid and emotion-based mobilization in digital spaces can strengthen group solidarity; however, it also risks intensifying polarization if not accompanied by improved digital literacy and rational dialogue platforms. The implications of this study highlight the importance of strengthening digital literacy, promoting responsible political communication management, and institutional support to foster an inclusive and deliberative digital public sphere. By doing so, emerging conflicts can be managed constructively to reinforce democracy in Indonesian

Keywords: Deliberative Democracy, Digital Political Conflict, Digital Literacy, Political Mobilization, Digital Public Sphere

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara komunikasi politik di Indonesia, membuat media sosial menjadi tempat utama untuk berinteraksi, menggerakkan massa, dan juga sebagai arena konflik politik. Tingginya tingkat keterlibatan publik di platform digital mendorong terjadinya polarisasi, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta perdebatan emosional yang dapat merusak kualitas demokrasi. Studi ini bertujuan untuk menelaah dinamika konflik politik dalam dunia digital, mengidentifikasi pola mobilisasi yang bisa memicu peningkatan ketegangan, serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik yang mendukung penguatan demokrasi deliberatif. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan cara melakukan studi literatur melalui analisis tematik terhadap beragam referensi ilmiah yang berkaitan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik politik di ranah digital memiliki karakter yang terstruktur, komunikatif, dan deliberatif yang saling

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

1484

terhubung. Mobilisasi yang cepat dan berbasis emosi dalam dunia digital dapat memperkuat solidaritas kelompok, tetapi juga memiliki risiko untuk memperparah polarisasi jika tidak disertai dengan peningkatan literasi digital dan wadah dialog yang rasional. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, pengelolaan komunikasi politik yang bertanggung jawab, serta dukungan dari lembaga untuk menciptakan ruang publik digital yang inklusif dan deliberatif, sehingga konflik yang timbul dapat dikelola secara konstruktif guna memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Demokrasi Deliberatif, Konflik Politik Digital, Literasi Digital, Mobilisasi Politik, Ruang Publik Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah secara radikal mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam politik. Media sosial kini bukan hanya sekadar tempat untuk berinteraksi, tetapi telah menjadi arena persaingan politik, penggerak massa, serta sarana produksi dan distribusi ide publik. Perubahan ini dengan jelas terlihat dalam berbagai dinamika politik saat ini di Indonesia, termasuk dalam aksi mahasiswa "Indonesia Gelap" 2025 yang menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk mobilisasi dan penyebaran kritik terhadap pemerintah (Ardiyanto & Melisa, 2025). Digitalisasi dalam arena politik juga terlihat dalam metode kampanye pemilu, seperti pada Pilkada Sulawesi Barat 2024, di mana media sosial berfungsi sebagai ruang strategis untuk menciptakan citra serta memecah opini publik (Nuraliah et al., 2025).

Dalam situasi konflik politik, ruang digital menghadirkan dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, media sosial meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta memperkuat demokrasi deliberatif dengan menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan inklusif (Hardiman, 2018). Media digital memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka secara bebas sebagai bagian dari komunitas sipil (Hidayah et al., 2020). Sebaliknya, percepatan dalam arus informasi dan algoritma platform juga dapat memicu polarisasi, penyebaran informasi yang salah, dan radikalisasi dalam diskusi politik yang berpotensi memperburuk konflik (Apriyani, 2021; Cortés-Ramos et al., 2021).

Fenomena pergerakan "Indonesia Gelap" menunjukkan bagaimana pendekatan komunikasi politik melalui digital mampu menciptakan narasi krisis menggunakan simbol visual dan hashtag yang menjadi populer, seperti "Garuda Hitam" dan IndonesiaGelap, sehingga berhasil menarik dukungan masyarakat secara luas (Ardiyanto & Melisa, 2025). Pendekatan ini menggambarkan pergeseran metode aksi dari demonstrasi fisik ke kampanye digital yang berlangsung dengan lebih cepat, luas, dan emosional. Namun, dinamika tersebut juga menimbulkan kritik bahwa mobilisasi digital bisa menurunkan stabilitas politik akibat penggunaan narasi yang tidak sesuai dan pembelahan pendapat publik (Nuraliah et al., 2025).

Beberapa kajian terdahulu telah mengeksplorasi peran platform media sosial dalam komunikasi politik dan aktivisme digital, baik dalam konteks gerakan

mahasiswa (Ardiyanto, 2021), upaya mobilisasi sosial (Negara & Murlianti, 2023), maupun keterlibatan pemuda dalam aktivisme digital (Cortés-Ramos et al., 2021). Penelitian lain fokus pada signifikansi keseimbangan antara mobilisasi moral dan risiko ekstremisme dalam gerakan sosial (Anders, 2023). Meskipun demikian, mayoritas penelitian masih menekankan pada pendekatan komunikasi atau efisiensi mobilisasi digital, dan belum secara menyeluruh membahas bagaimana menangani konflik politik dalam ranah digital melalui metode penyelesaian konflik yang konstruktif untuk meningkatkan demokrasi.

Di sinilah terdapat kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini tidak hanya melihat ruang digital sebagai tempat untuk mobilisasi politik, melainkan juga sebagai arena perseteruan yang membutuhkan pendekatan resolusi berbasis diskusi dan keterampilan literasi digital. Kedua, penelitian ini berusaha memadukan sudut pandang komunikasi politik digital dengan teori demokrasi deliberatif (Hardiman, 2018) untuk merancang strategi penguatan demokrasi di tengah meningkatnya polarisasi di dunia maya. Ketiga, penelitian ini memandang konflik politik digital tidak hanya sebagai ancaman terhadap stabilitas, tetapi juga sebagai indikasi dari transisi demokrasi yang memerlukan pengelolaan ruang publik digital yang lebih inklusif dan transparan.

Pentingnya penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya intensitas konflik wacana di media sosial, baik dalam konteks gerakan sosial maupun kompetisi elektoral. Tanpa adanya strategi penyelesaian yang efektif, konflik digital bisa memperburuk polarisasi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Sebaliknya, jika ditangani melalui dialog yang rasional, verifikasi fakta, dan peningkatan literasi digital, ruang digital dapat diubah menjadi alat untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis dinamika konflik politik dalam ruang digital dalam kerangka komunikasi politik masa kini; (2) mengidentifikasi pola dan strategi mobilisasi yang dapat memperbesar eskalasi atau menciptakan peluang penyelesaian konflik; serta (3) merumuskan strategi penyelesaian konflik digital yang dapat mendukung penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali fenomena secara mendetail melalui interpretasi makna, proses, dan konteks sosial yang menyertainya, bukannya hanya berdasarkan pengukuran angka atau uji statistik. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai alat utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara alami, dengan penekanan pada proses, pemahaman, dan makna yang timbul dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan induktif yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang luas tentang fenomena yang sedang diteliti (Widodo, 2022). Tipe penelitian yang diambil adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur. Penelitian pustaka dilakukan dengan melakukan kajian terhadap berbagai sumber tulisan seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, dan literatur lainnya yang

relevan sebagai data utama. Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengatur informasi dengan cara yang sistematis agar data yang diperoleh mempunyai validitas dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik. Metode ini dianggap efektif dalam membangun kerangka konseptual serta landasan teoretis penelitian (Supriatna et al., 2025). Langkah-langkah dalam penelitian mencakup identifikasi masalah, penelusuran literatur, pemilihan dan penyaringan data, pengelompokan informasi berdasarkan tema, serta analisis tematik dengan pendekatan induktif. Data yang telah dikelompokkan kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan fokus kajian, sehingga menghasilkan temuan yang disajikan secara deskriptif-analitis. Dengan cara ini, pendekatan kualitatif yang didasari studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman teoritis yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang dikaji (Widodo, 2022; Supriatna et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik politik dalam ruang digital, mengidentifikasi pola mobilisasi yang berpotensi memperbesar eskalasi konflik, serta merumuskan strategi resolusi yang mendukung penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik terhadap literatur yang relevan dalam lima tahun terakhir, dengan fokus pada konteks Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik politik digital di Indonesia memiliki karakter struktural, komunikatif, dan deliberatif yang saling berkaitan.

Dinamika Konflik Politik dalam Ruang Digital

Ruang digital dalam beberapa tahun terakhir menjadi tempat utama masyarakat menyampaikan sikap politiknya. Media sosial memungkinkan individu maupun kelompok untuk secara langsung menyuarakan dukungan, kritik, serta kekecewaan terhadap aktor dan kebijakan politik. Intensitas interaksi yang tinggi membuat konflik politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi berkembang melalui unggahan, komentar, dan penyebaran konten yang terus berulang di ruang digital.

Situasi ini terlihat jelas dalam pelaksanaan Pilkada Jember 2020. Konflik politik tidak hanya muncul dalam bentuk persaingan program antar pasangan calon, tetapi berkembang melalui penyebaran informasi dan visual politik di media sosial. Narasi yang dibangun oleh pendukung masing-masing kandidat cenderung menonjolkan citra positif kelompok sendiri sekaligus memunculkan tuduhan terhadap pihak lawan. Pola ini mendorong terbentuknya ketegangan di ruang digital, terutama ketika informasi yang beredar tidak sepenuhnya diverifikasi dan diterima secara emosional oleh masyarakat (Wirawan et al., 2020).

Dinamika konflik yang hampir serupa juga tampak dalam aksi mahasiswa "Indonesia Gelap" tahun 2025. Media sosial digunakan sebagai sarana utama untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah serta membangun dukungan publik secara cepat. Penggunaan simbol visual dan tagar yang konsisten membuat pesan

gerakan mudah dikenali dan menyebar luas. Namun, penyebaran pesan yang masif tersebut juga memicu perdebatan tajam di ruang digital, baik antara pendukung gerakan maupun kelompok yang memiliki pandangan berbeda, sehingga konflik berkembang secara terbuka di hadapan publik (Ardiyanto & Melisa, 2025).

Dari berbagai situasi tersebut, konflik politik di ruang digital tidak muncul secara tiba-tiba. Konflik berkembang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pandangan politiknya. Masalah utama bukan terletak pada keberadaan konflik itu sendiri, melainkan pada pola interaksi yang cenderung cepat, emosional, dan minim ruang klarifikasi, sehingga konflik sering kali berlarut tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas.

Pola Mobilisasi Digital dan Eskalasi Konflik Politik

Mobilisasi politik melalui media digital menunjukkan karakter yang berbeda dibandingkan mobilisasi konvensional. Media sosial memungkinkan penyebaran pesan politik berlangsung secara cepat dan luas tanpa bergantung pada struktur organisasi formal. Isu yang dianggap relevan oleh publik dapat dengan mudah menarik perhatian dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam waktu singkat.

Dalam konteks kampanye politik, seperti pada Pilkada Sulawesi Barat 2024, mobilisasi digital dilakukan melalui penggunaan konten visual, bahasa lokal, serta keterlibatan figur populer di media sosial. Strategi ini efektif menjangkau pemilih muda dan meningkatkan partisipasi politik di ruang digital. Namun, fokus pada daya tarik visual dan popularitas juga membuat pesan politik lebih menekankan aspek pencitraan dibandingkan pembahasan substansi kebijakan (Nuraliah et al., 2024).

Pola mobilisasi semacam ini berpotensi memperbesar konflik ketika pesan yang disampaikan bersifat menyudutkan pihak lain. Penggunaan simbol, slogan, dan framing tertentu dapat memperkuat solidaritas internal kelompok, tetapi sekaligus memicu reaksi defensif dari kelompok yang berbeda pandangan. Dalam situasi tersebut, ruang digital berubah menjadi tempat saling menyerang, bukan lagi ruang untuk saling memahami (Wirawan et al., 2020).

Meski demikian, mobilisasi digital tidak selalu berakhir pada eskalasi konflik. Dalam beberapa kasus, media sosial juga dimanfaatkan untuk menyampaikan klarifikasi, membangun dialog, serta memperluas pemahaman publik terhadap isu yang diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak mobilisasi digital sangat bergantung pada cara pesan disusun dan bagaimana aktor politik mengelola interaksi dengan masyarakat.

Strategi Resolusi Konflik Digital dan Penguatan Demokrasi

Mengelola konflik politik di ruang digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian, tetapi juga pada perbaikan kualitas komunikasi politik. Konflik muncul sebagai konsekuensi dari tingginya partisipasi publik, sehingga strategi penyelesaian perlu diarahkan pada penciptaan ruang diskusi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membentuk iklim politik digital yang lebih konstruktif. Melalui produksi konten yang edukatif dan penyampaian pendapat yang lebih berimbang, generasi muda dapat membantu meredam konflik dan mendorong diskusi yang lebih terbuka di media sosial (Hanafiah et al., 2023). Peran ini menjadi semakin relevan mengingat dominasi generasi muda sebagai pengguna aktif media digital.

Selain peran masyarakat, dukungan kelembagaan juga diperlukan untuk menjaga kualitas ruang digital. Platform media sosial dan aktor negara perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang adil terhadap penyebaran informasi tanpa membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Keseimbangan ini penting agar ruang digital tidak menjadi tempat konflik yang tak terkendali, tetapi tetap berfungsi sebagai sarana partisipasi politik yang sehat.

Dengan demikian, konflik politik di ruang digital tidak seharusnya dipahami sebagai ancaman yang harus dihindari sepenuhnya. Konflik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sedang berlangsung. Tantangan utamanya adalah memastikan konflik tersebut dikelola secara konstruktif, sehingga ruang digital dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi, bukan justru memperdalam perpecahan di masyarakat.

SIMPULAN

Konflik politik di ruang digital muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan demokrasi modern, di mana media sosial berfungsi sebagai wadah interaksi, mobilisasi, dan pembentukan opini publik, seperti terlihat pada aksi mahasiswa “Indonesia Gelap” 2025 dan Pilkada Sulawesi Barat 2024. Meskipun mobilisasi digital dapat memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat solidaritas kelompok, dinamika ini juga berpotensi menimbulkan polarisasi serta mempercepat eskalasi konflik ketika pesan yang disebarkan bersifat emosional atau provokatif. Oleh karena itu, pengelolaan konflik digital membutuhkan pendekatan yang konstruktif melalui dialog rasional, peningkatan literasi digital, klarifikasi informasi, serta keterlibatan generasi muda dan dukungan institusi terkait. Dengan strategi yang tepat, konflik politik di dunia maya tidak hanya dapat diminimalkan risikonya, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi deliberatif serta menciptakan ruang publik digital yang lebih inklusif, transparan, dan sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, A., Olivia, D., Moonti, R. M. (2025). Pengaruh Media Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Terkait Tantangan dan Peluang di Era Demokrasi Digital. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 201-212.
- Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. (2025). Analisis strategi komunikasi politik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap 2025. *Jurnal Heritage*, 13(1), 17-33.
- Chambers, S. (2023). Deliberative democracy and the digital public sphere: Asymmetrical fragmentation as a political not a technological problem. *Constellation*, 30(1), 61-68

-
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Fatimah, S. (2024). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67-86.
- Fuchs, C. (2020). *Digital democracy and the digital public sphere*. Routledge.
- Hanafiah Alby, J. D. A., Setiawan, A. P., & Azhar, S. R. A. (2024). Mitigasi ekosistem politik destruktif: Upaya generasi muda dalam mengatasi polarisasi politik berbasis media digital. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(2), 117-132.
- Habermas, J. (1962). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Laksuria, A., Risnandar, G. N., Aqila, R. Q., & Wijaya, R. (2025). Tantangan dan peluang pemilu di era digital: Menjawab isu media sosial dan keamanan demokrasi bagi mahasiswa ITB. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 6(1), 544-549.
- Nuraliah, D., Rahmawati, R., Hendrawan, H., Nasiruddin, N., & Razak, F. S. H. (2025). Dinamika digitalisasi dalam kampanye politik: Fenomena media sosial dalam Pilkada Sulawesi Barat 2024. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 10(1), 25-31.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Suta Wirawan, I. G. M. A., Mudana, I. W., Sitompul, L. O., Nur, I., & Purnawibawa, A. G. (2021). Dinamika konflik politik di ruang digital pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Jember. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(1), 62-80.
- Wahyudi, R. F., et al. (2024). Ruang publik, media sosial, demokrasi, dan pendekatan kritis. *Retorika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 17-32.